

# EKSPLORASI KETERKAITAN KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN TINGKAT LAYANAN PENDIDIKAN

Biizni Putri Bengi<sup>a\*</sup>

Irwan Taufiq Ritonga<sup>b</sup>

<sup>ab</sup>Universitas Gadjah Mada Yogyakarta/Magister Akuntansi

Corresponding author: [Biizniputribengi@gmail.com](mailto:Biizniputribengi@gmail.com)

## ABSTRACT

**Purpose** – This study aims to explore the linkage between the financial condition of local government and education service level in cluster two of local government.

**Methodology** –The financial condition of local government are measured using dimension that related to services that given by local government, this dimension is service level solvency. This dimension consists of two ratios, expenditure ratio and asset ratio. The level of education services is measured using achievement indicators contained in the minimum education service standard (SPM). This study uses a descriptive qualitative method. Secondary data were collected through documentation technique and the primary data were collected through semi-structured interview technique.

**Findings** – The findings in this study showed that there is no linkage between the financial conditions of local governments and the level of education services. interviews were conducted to confirm how the involvement of local governments in the planning and budgeting processes in the regions, priorities that form the basis of budgeting and factors that influence the achievement of minimum service standards (SPM). The results of interview data analysis indicate that the involvement of the local education office (dinas pendidikan) in the planning and budgeting process in the local government is quite good, and minimum service standards are one of the bases in budgeting. Furthermore, the factors that influence the achievement of minimum service standards are human resource capacity, stakeholder awareness and budgeting capabilities in the education unit.

**Keywords:** Financial condition, local government, service level, education service level, minimum services standard (SPM), asset ratio, expenditure ratio.

## INTISARI

**Tujuan** – Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterkaitan kondisi keuangan pemerintah daerah dengan tingkat layanan pendidikan pada pemerintah daerah di Indonesia.

**Metode penelitian** – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kondisi keuangan pemerintah daerah diukur dengan dua rasio, yaitu rasio belanja per kapitan bidang pendidikan dan rasio aset tetap per kapita bidang pendidikan. Tingkat layanan pendidikan diukur menggunakan capaian indikator-indikator yang terdapat dalam standar pelayanan minimal pendidikan. Data yang dianalisis ialah data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dan wawancara semi terstruktur. Dokumentasi dilakukan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah dan tingkat layanan pendidikan yang diukur berdasarkan capaian indikator standar pelayanan minimal. Wawancara dilakukan untuk mengkonfirmasi penyebab terdapat/tidak terdapatnya keterkaitan antara kondisi keuangan dengan tingkat layanan pendidikan, bagaimana keterlibatan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah, prioritas yang menjadi dasar dalam penetapan anggaran dan faktor yang memengaruhi capaian standar pelayanan minimal.

**Hasil penelitian** – Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah tidak terdapat keterkaitan antara kondisi keuangan pemerintah daerah dengan tingkat layanan pendidikan. Hasil analisis data wawancara menunjukkan bahwa penyebab tidak terdapatnya keterkaitan antara kondisi keuangan dengan tingkat layanan pendidikan karena jumlah alokasi anggaran yang besar untuk urusan pendidikan yaitu 20% dari total APBD sementara dana yang dibutuhkan untuk pemenuhan SPM hanya sedikit. Sehingga yang menjadi permasalahan tidak tercapainya SPM bukan masalah kondisi keuangan. Lebih lanjut, faktor yang memengaruhi capaian standar pelayanan minimal ialah kapasitas sumber daya manusia, kesadaran pemangku kepentingan dan kemampuan penganggaran pada satuan pendidikan.

**Kata Kunci:** Kondisi keuangan, pemerintah daerah, tingkat layanan, tingkat layanan pendidikan, standar pelayanan minimal (SPM), rasio aset tetap per kapita, rasio belanja per kapita.

## **I. Pendahuluan**

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan negara, pemerintah menerapkan prinsip otonomi daerah, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing (UU Nomor 23 Tahun 2014). Pelimpahan wewenang juga diberlakukan dalam hal keuangan, atau disebut juga dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam mengelola sendiri keuangan daerah. Dampak dari desentralisasi fiskal ialah berbedanya alokasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah (APBD) antar pemerintah daerah. Perbedaan alokasi APBD ini menyebabkan kondisi keuangan yang berbeda pada setiap pemerintah daerah (Ritonga 2012).

Menurut Zafra-Gomez (2009) semakin baik kondisi keuangan maka semakin baik tingkat pelayanan yang diberikan. Salah satu jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah ialah layanan pendidikan. Secara umum, dasar yang menjadi acuan dalam memberikan layanan dalam bidang pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

Penelitian mengenai keterkaitan kondisi keuangan dan tingkat layanan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya dilakukan oleh Carmeli (2007). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemerintah dengan kondisi keuangan yang baik akan memberikan layanan pendidikan yang lebih baik. Penelitian selanjutnya dilakukan Carmeli (2008) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah yang mengalami tekanan keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zafra-Gomez (2012) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kondisi keuangan pemerintah daerah terhadap kapasitas pemerintah dalam memberikan layanan. Artinya semakin baik kondisi keuangan maka semakin baik pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian-penelitian di luar negeri tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara kondisi keuangan dan tingkat layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Namun, sejauh pengetahuan penulis, di Indonesia belum ada penelitian yang mengeksplorasi keterkaitan kondisi keuangan dengan tingkat layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Mengingat luasnya layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, penelitian ini berfokus pada layanan pendidikan. Keterkaitan antara kondisi keuangan dengan tingkat layanan pendidikan penting untuk diteliti karena sekurang-kurangnya 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dialokasikan untuk pendidikan. Selain itu, menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Maka dari itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang membahas tentang keterkaitan antara kondisi keuangan dengan tingkat layanan pendidikan.

## **II. Kajian Pustaka**

### **a. Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah**

Telah banyak upaya yang dilakukan oleh para ahli untuk mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah. Maher dan Nollenberger (2009) menyatakan bahwa kondisi keuangan merupakan kemampuan organisasi untuk mengelola tingkat layanan yang ada, bertahan terhadap gangguan ekonomi, dan memenuhi segala tuntutan terkait pertumbuhan dan penurunan. *The Financial Trend Monitoring System (FTMS)* yang dikembangkan oleh *the International*

*City/County Management Association (ICMA)* (2011) mendefinisikan kondisi keuangan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk mempertahankan tingkat layanan yang ada, bertahan dari gangguan ekonomi lokal dan regional, dan memenuhi tuntutan pertumbuhan, penurunan, dan perubahan yang terjadi secara alami. Dinapoli (2011) mendefinisikan kondisi keuangan berdasarkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja dengan tetap mempertahankan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Ritonga (2012) mendefinisikan kondisi keuangan sebagai kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya (jangka pendek, jangka panjang, operasional, dan menyediakan layanan publik), mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efektif dan efisien. Kamnikar dalam Ritonga (2014) mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo dan kemampuan untuk terus memberikan layanan kepada konstituen yang membutuhkan. Ritonga (2014) menyatakan bahwa dalam mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah, sebaiknya diturunkan dari tujuan nasional, karena kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan efek keuangan yang diakibatkan dari kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan negara.

Berdasarkan berbagai definisi kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya dalam hal keuangan dengan terus mempertahankan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

#### **b. Standar Pelayanan Minimal**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.

#### **c. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, SPM pendidikan adalah salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar dan merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan. Adapun indikator pencapaian SPM dalam bidang pendidikan dapat dibagi menjadi dua kelompok pelayanan, yaitu pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota dan pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan. Indikator pencapaian SPM tersebut dapat dilihat dalam lampiran 1.

#### **d. Hubungan antara Kondisi Keuangan dan Tingkat Layanan**

Jones (2007) mendefinisikan kesulitan keuangan sebagai kurangnya kemampuan pemerintah untuk terus memberikan layanan kepada warga negara pada tingkat dan jenis yang sama. Hendrick (2004) mengaitkan kondisi keuangan pemerintah daerah dengan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan dan layanan masyarakat. Rivenbark dan Roenigk (2010) mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, layanan, dan persyaratan modal seperti yang disajikan dalam laporan keuangan masing-masing pemerintah. Zafra-Gomez (2009) menyatakan bahwa semakin baik kondisi keuangan, maka semakin baik tingkat pelayanan yang diberikan. Berdasarkan uraian

tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah berhubungan dengan kondisi keuangan pemerintah itu sendiri.

#### **e. Penelitian Terdahulu**

Zafra-Gomez (2009) menyatakan bahwa kondisi keuangan pemerintah menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan. Artinya, layanan yang diberikan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kondisi keuangan pemerintah daerah. Carmeli (2008) menyatakan bahwa kondisi keuangan atau tekanan keuangan memiliki dampak pada kapasitas pemerintah daerah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Artinya, pemerintah dengan kondisi keuangan yang buruk atau berada dalam tekanan keuangan akan memengaruhi kapasitasnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi keuangan yang baik, maka layanan yang diberikan kepada masyarakat akan baik. Menurut Pennsylvania Economy League (2017) tekanan keuangan yang dialami oleh pemerintah telah mengancam kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar yang menjaga komunitas tempat tinggal, bekerja dan keamanan sekolah. Hal ini berarti kesehatan keuangan berpengaruh langsung pada layanan kesehatan, pengadilan dan pendidikan.

### **III. Metode Penelitian**

#### **a. Objek dan Pendekatan Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah pemerintah kabupaten, untuk meningkatkan efektifitas analisis, maka peneliti menggunakan pemerintah kabupaten yang berada pada klaster dua berdasarkan hasil penelitian Sasongko (2018). Pemerintah kabupaten pada klaster dua merupakan pemerintah kabupaten dengan ciri ramai dan produktif, artinya pemerintah kabupaten yang berada di dalam klaster ini memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dan lebih produktif jika dibandingkan dengan klaster-klaster lainnya. Tujuan dilakukannya pengklasteran pemerintah daerah ialah untuk meningkatkan *fairness* dalam membandingkan kondisi keuangan. Klaster dua beranggotakan 99 pemerintah kabupaten dari berbagai pulau yang ada di Indonesia.

Pemilihan pemerintah kabupaten sebagai objek penelitian karena jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah kota, sehingga diharapkan dapat merepresentasikan populasi. Selain itu, jumlah penduduk pada pemerintah kabupaten juga lebih banyak jika dibandingkan dengan pemerintah kota dan luas wilayah kabupaten yang lebih luas jika dibandingkan dengan pemerintah kota juga menjadi alasan pemilihan pemerintah kabupaten sebagai objek pada penelitian ini. Pemilihan pemerintah kabupaten pada klaster dua didasarkan pada jumlah penduduknya yang lebih banyak diantara klaster-klaster lainnya, sehingga diharapkan dapat merepresentasikan populasi.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2014) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna suatu masalah sosial atau kemanusiaan yang dialami suatu individu atau kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterkaitan kondisi keuangan dengan tingkat layanan pendidikan. Maka dari itu, pendekatan kualitatif dianggap paling sesuai untuk digunakan karena bersifat eksploratif.

#### **b. Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendapatkan informasi jumlah aset tetap dinas pendidikan dan belanja bidang pendidikan. Laporan standar pelayanan minimal dan *roadmap* standar pelayanan

minimal pendidikan yang diperoleh dari masing-masing kabupaten dan kementerian pendidikan untuk mendapatkan informasi tentang capaian standar pelayanan minimal dan data jumlah peserta didik dan guru yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan partisipan penelitian. Partisipan pada penelitian ini adalah kepala subbagian perencanaan dan evaluasi badan pembangunan daerah, kepala subbagian keuangan dinas pendidikan, dan kepala subbidang perencanaan anggaran badan keuangan dan aset daerah.

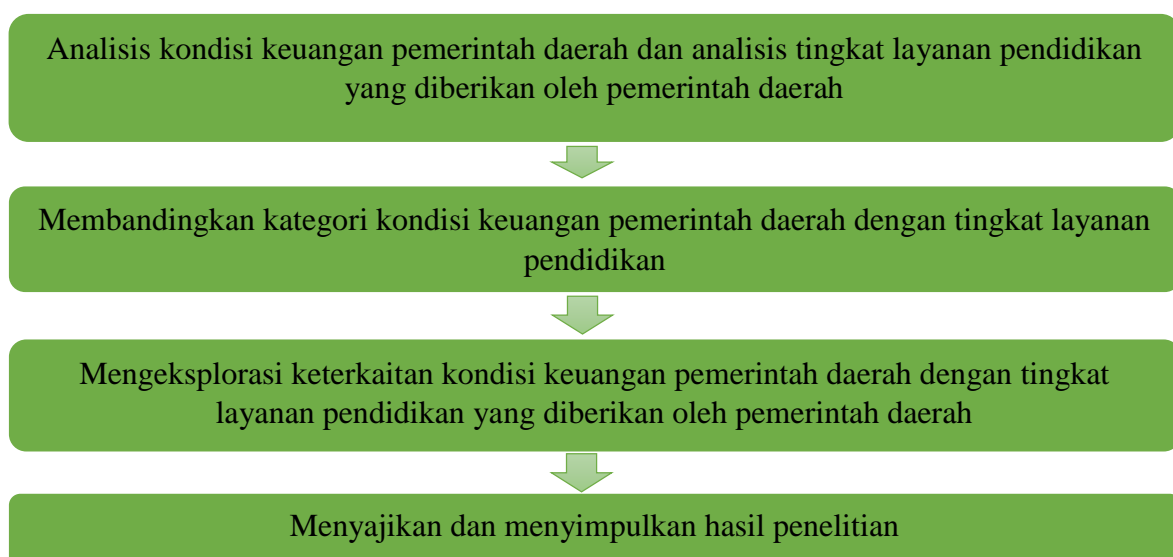
Sebanyak 99 LHP atas LKPD dan 23 laporan standar pelayanan minimal atau roadmap SPM berhasil diperoleh oleh peneliti. Penggunaan data pada penelitian ini menyesuaikan dengan ketersediaan data laporan standar pelayanan minimal. Maka dari itu, data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan data dari 23 pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten tersebut adalah sebagai berikut.

1 Badung	9 Gianyar	17 Lombok Tengah
2 Bangli	10 Grobogan	18 Magelang
3 Banjarnegara	11 Gunung Kidul	19 Mojokerto
4 Bantul	12 Jombang	20 Pamekasan
5 Banyumas	13 Karangasem	21 Pekalongan
6 Brebes	14 Klaten	22 Purbalingga
7 Buleleng	15 Kulon Progo	23 Sleman
8 Demak	16 Lombok Barat	

### c. Proses Penelitian

Proses penelitian keterkaitan antara kondisi keuangan pemerintah daerah dan tingkat layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan cara menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah dan menganalisis tingkat layanan pendidikan. kemudian melakukan analisis keterkaitan dengan membandingkan kategori kondisi keuangan dan tingkat layanan pendidikan. setelah mengetahui terdapat atau tidak terdapatnya keterkaitan antara kondisi keuangan pemerintah daerah dengan tingkat layanan pendidikan, peneliti melakukan wawancara untuk mengeksplorasi penyebab terdapat atau tidak terdapat keterkaitan antara kondisi keuangan dengan tingkat layanan pendidikan. Proses Penelitian disajikan dalam gambar 1.

**Gambar 1**  
**Proses Analisis Data**



## 1. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kondisi keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Ritonga (2014). Analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan kelompok acuan (*benchmark*) pemerintah daerah yang setara. Penelitian ini menggunakan pemerintah kabupaten yang berada dalam klaster dua hasil penelitian Sasongko (2018).
- b. Menghitung rasio dimensi solvabilitas layanan untuk setiap pemerintah kabupaten, yaitu rasio belanja per kapita dan rasio aset tetap per kapita. Rumus rasio solvabilitas layanan adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Per Kapita} = \frac{\text{Total Belanja Pendidikan}}{\text{Jumlah Guru dan Murid}}$$

$$\text{Rasio Aset Tetap Per Kapita} = \frac{\text{Total Aset Tetap Dinas Pendidikan}}{\text{Jumlah Guru dan Murid}}$$

- c. Menghitung indeks rasio dan indeks dimensi solvabilitas layanan  
Formula yang digunakan untuk menghitung indeks rasio adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Rasio} = \frac{(\text{nilai aktual} - \text{nilai minimum})}{(\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})}$$

Formula yang digunakan untuk menghitung indeks dimensi ialah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Dimensi} = \frac{(I \text{ indikator } 1 + I \text{ indikator } 2 + \dots + I \text{ indikator } n)}{n}$$

- d. Melakukan pengkategorian kondisi keuangan  
Pengkategorian kondisi keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan cara membagi data pemerintah kabupaten kedalam kelompok kuartil. Kuartil 1 (0-25%) pemerintah kabupaten dikategorikan sangat buruk, kuartil 2 (26%-50%) termasuk dalam kategori buruk, kuartil 3 (51%-75%) termasuk dalam kategori baik, dan kuartil 4 (76%-100%) termasuk dalam kategori sangat baik.

## 2. Analisis Tingkat Layanan Pendidikan Pemerintah Daerah

- a. Analisis Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal  
Analisis tingkat layanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan cara menilai tingkat ketercapaian standar pelayanan minimal pendidikan. Penilaian dilakukan dengan cara menjumlahkan persentase capaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar pada setiap indikator kemudian dibagi dengan jumlah indikator. Adapun rumus untuk menganalisis tingkat layanan pendidikan ialah sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Layanan} = \frac{(\text{Indikator } 1 + \text{Indikator } 2 + \dots + \text{Indikator } 27)}{27}$$

- b. Melakukan Pengkategorian Tingkat Layanan Pendidikan  
Pengkategorian dilakukan dengan cara membagi data tingkat layanan pendidikan pemerintah daerah kedalam kelompok kuartil. Rumus yang digunakan untuk menentukan letak kuartil pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 0-25% pemerintah kabupaten tertinggi (kuartil 1) dikategorikan sangat buruk, 26%-50% (kuartil 2) termasuk dalam kategori buruk, 51%-75%

(kuartil 3) termasuk dalam kategori baik, dan 76%-100% (kuartil 4) termasuk dalam kategori sangat baik.

### **3. Analisis Keterkaitan Kondisi Keuangan dengan Tingkat Layanan Pendidikan**

Analisis keterkaitan antara kondisi keuangan dan tingkat layanan dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan melakukan analisis konsistensi dan analisis nilai rata-rata.

#### **a. Analisis Konsistensi**

Untuk menganalisis keterkaitan kondisi keuangan pemerintah daerah dengan tingkat layanan pendidikan, peneliti melakukan analisis konsistensi kondisi keuangan dan tingkat layanan pendidikan. Analisis konsistensi dilakukan untuk melihat apakah pemerintah dengan kategori keuangan yang baik akan memberikan layanan pendidikan yang baik pula. Pemerintah daerah dengan kondisi keuangan yang baik atau berada pada kuartil 4 seharusnya juga terletak pada kuartil 4 pada tingkat layanan pendidikan. Dapat disimpulkan terdapat keterkaitan apabila sebagian besar pemerintah daerah konsisten berada dalam kuartil yang sama.

#### **b. Analisis Nilai Rata-Rata**

Untuk menganalisis keterkaitan antara kondisi keuangan dengan tingkat layanan pendidikan, peneliti juga melakukan analisis terhadap nilai rata-rata tingkat layanan pendidikan. Nilai rata-rata merupakan ukuran pemusatan data yang menunjukkan pusat dari sebaran data. Pemerintah dengan kondisi keuangan yang baik tentunya akan memiliki nilai rata-rata tingkat layanan yang baik pula. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang terletak dalam kuartil 4 indeks kondisi keuangan akan memiliki nilai rata-rata tingkat layanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang terletak di kuartil 3.

### **4. Analisis Penyebab Terdapat/Tidak Terdapatnya Keterkaitan Antara Kondisi Keuangan dengan Tingkat Layanan Pendidikan**

Untuk mengetahui penyebab terdapat/tidak terdapatnya keterkaitan antara kondisi keuangan dengan tingkat layanan pendidikan, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur kepada partisipan di salah satu pemerintah kabupaten yang diteliti. Teknik analisis data wawancara pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data tekstual berdasarkan Creswell (2015).

## **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah**

Analisis kondisi keuangan dilakukan dengan cara menghitung rasio solvabilitas layanan, indeks rasio, indeks dimensi kondisi keuangan dan diakhiri dengan pemerincian dan pengkategorian kondisi keuangan. Proses detail analisis kondisi keuangan disajikan dalam uraian berikut.

#### **a. Analisis Rasio Dimensi Solvabilitas Layanan**

Sebagai ilustrasi dalam menghitung rasio solvabilitas layanan, dipilih salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman.

$$\text{Rasio Belanja Per Kapita} = \frac{741.589.567.429}{135.733}$$

$$= 5.463.591$$

$$\text{Rasio Aset Tetap Per Kapita} = \frac{348.887.142.353}{135.733}$$

$$= 2.570.393$$

Hasil penghitungan rasio solvabilitas layanan disajikan dalam tabel 1.

**Tabel 1**  
**Analisis Rasio Belanja Per Kapita dan Rasio Aset Per Kapita**

No	Kabupaten	Rasio Belanja Per Kapita	Rasio Aset Tetap Per Kapita
1	Badung	Rp6.533.242,00	Rp13.934.771,00**
2	Bangli	Rp7.158.294,00	Rp6.488.318,00
3	Gianyar	Rp7.596.758,00	Rp5.926.483,00
4	Kulon Progo	Rp8.794.603,00	Rp6.717.267,00
5	Karangasem	Rp8.108.163,00	Rp7.157.196,00
6	Mojokerto	Rp6.345.204,00	Rp7.402.089,00
7	Gunung Kidul	Rp8.459.859,00	Rp8.919.870,00
8	Sleman	Rp5.463.591,00	Rp2.570.393,00*
9	Banjarnegara	Rp6.807.468,00	Rp10.550.507,00
10	Lombok Barat	Rp4.692.099,00	Rp3.675.696,00
11	Demak	Rp2.919.406,00*	Rp5.487.817,00
12	Buleleng	Rp6.303.054,00	Rp6.422.924,00
13	Bantul	Rp5.878.859,00	Rp3.181.608,00
14	Pekalongan	Rp6.100.773,00	Rp6.569.778,00
15	Purbalingga	Rp5.595.143,00	Rp5.257.342,00
16	Lombok Tengah	Rp5.276.321,00	Rp4.680.785,00
17	Banyumas	Rp5.108.579,00	Rp4.940.646,00
18	Jombang	Rp6.480.314,00	Rp6.356.454,00
19	Klaten	Rp5.663.063,00	Rp2.833.630,00
20	Magelang	Rp6.122.440,00	Rp6.708.122,00
21	Brebes	Rp10.617.627,00**	Rp9.731.385,00
22	Pamekasan	Rp6.589.639,00	Rp5.950.948,00
23	Grobogan	Rp4.716.367,00	Rp3.568.437,00

Tabel 1 menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Brebes memiliki nilai rasio belanja per kapita tertinggi di antara pemerintah kabupaten lainnya yaitu senilai Rp.10.617.627,00. Artinya, Pemerintah Kabupaten Brebes mengeluarkan belanja pendidikan sebanyak Rp.10.617.627,00 untuk masyarakat yang menikmati layanan pendidikan. Sedangkan pemerintah Kabupaten Demak memiliki nilai rasio belanja per kapita terendah di antara pemerintah kabupaten lainnya yaitu senilai Rp2.919.406,00. Artinya, pemerintah Kabupaten Demak hanya mengeluarkan sebesar Rp2.919.406,00 untuk setiap masyarakat yang menikmati layanan pendidikan. sementara itu, Pemerintah Kabupaten Badung memiliki rasio aset tetap per kapita tertinggi di antara pemerintah kabupaten lainnya yaitu senilai Rp13.934.771,00. Artinya, Pemerintah Kabupaten Badung memiliki aset tetap senilai Rp13.934.771,00 untuk melayani setiap masyarakatnya. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki nilai rasio aset tetap per kapita terendah di antara pemerintah kabupaten lainnya yaitu senilai Rp2.570.393,00. Artinya, Pemerintah Kabupaten Sleman hanya memiliki aset tetap senilai Rp2.570.393,00 untuk melayani setiap warganya. Adapun data jumlah total belanja pendidikan, total aset tetap dinas pendidikan dan jumlah peserta didik serta guru disajikan dalam lampiran.



### b. Indeks Rasio Solvabilitas Layanan

Berikut adalah ilustrasi dalam menghitung indeks rasio solvabilitas layanan Pemerintah Kabupaten Sleman. Nilai aktual Pemerintah Kabupaten Sleman, nilai minimum dan nilai maksimum pemerintah kabupaten yang dianalisis berturut-turut ialah Rp5.463.591, Rp2.919.406, Rp10.617.627. Maka indeks rasio belanja per kapita Pemerintah Kabupaten Sleman ialah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Indeks Rasio Belanja Per Kapita} &= \frac{(5.463.591 - 2.919.406)}{(10.617.627 - 2.919.406)} \\ &= 0,33 \end{aligned}$$

Hasil penghitungan indeks rasio belanja per kapitan dan rasio aset tetap per kapita disajikan dalam tabel 2.

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Indeks Rasio Belanja Per Kapita dan Rasio Aset Tetap Per Kapita**

No	Kabupaten	Indeks Rasio Belanja Per Kapita	Indeks Rasio Aset Tetap Per Kapita
1	Badung	0,47	1,00
2	Bangli	0,55	0,34
3	Gianyar	0,61	0,30
4	Kulon Progo	0,76	0,36
5	Karangasem	0,67	0,40
6	Mojokerto	0,45	0,43
7	Gunung Kidul	0,72	0,56
8	Sleman	0,33	0,00
9	Banjarnegara	0,51	0,70
10	Lombok Barat	0,23	0,10
11	Demak	0,00	0,26
12	Buleleng	0,44	0,34
13	Bantul	0,38	0,05
14	Pekalongan	0,41	0,35
15	Purbalingga	0,35	0,24
16	Lombok Tengah	0,31	0,19
17	Banyumas	0,28	0,21
18	Jombang	0,46	0,33
19	Klaten	0,36	0,02
20	Magelang	0,42	0,36
21	Brebes	1,00	0,63
22	Pamekasan	0,48	0,30
23	Grobogan	0,23	0,09

**c. Menghitung Indeks Kondisi Keuangan dan Pengkategorian**

Ilustrasi dalam menghitung indeks dimensi solvabilitas layanan ialah sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki nilai indeks rasio belanja per kapita sebesar 0.17 dan indeks rasio aset tetap per kapita sebesar 0.00 maka indeks kondisi keuangan ialah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Indeks Kondisi Keuangan} &= \frac{0,17 + 0.00}{2} \\ &= 0,085 \end{aligned}$$

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Indeks Kondisi Keuangan**

No	Kabupaten	Indeks Kondisi Keuangan
1	Demak	0,13
2	Grobogan	0,16
3	Lombok Barat	0,16
4	Sleman	0,17
5	Klaten	0,19
6	Bantul	0,22
7	Lombok Tengah	0,25
8	Banyumas	0,25
9	Purbalingga	0,29
10	Pekalongan	0,38
11	Pamekasan	0,39
12	Buleleng	0,39
13	Magelang	0,39
14	Jombang	0,40
15	Mojokerto	0,44
16	Bangli	0,45
17	Gianyar	0,45
18	Karangasem	0,54
19	Kulon Progo	0,56
20	Banjarnegara	0,60
21	Gunung Kidul	0,64
22	Badung	0,73
23	Brebes	0,82

Tabel 3 menunjukkan Pemerintah Kabupaten Brebes merupakan pemerintah kabupaten dengan kondisi keuangan terbaik diantara pemerintah kabupaten lainnya dengan nilai indeks solvabilitas layanan sebesar 0,82 sedangkan Pemerintah Kabupaten Demak merupakan pemerintah daerah dengan kondisi keuangan terburuk diantara pemerintah kabupaten lainnya dengan nilai indeks solvabilitas layanan sebesar 0.13.

**d. Pengkategorian Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengkategorian kondisi keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan cara membagi data kondisi keuangan kedalam empat kategori berdasarkan nilai kuartil. Kondisi keuangan pemerintah daerah yang termasuk dalam kuartil 1,2,3 dan 4 secara berturut-turut dikategorikan dengan label sangat

buruk, buruk, baik dan sangat baik. Adapun hasil pemeringkatan dan pengkategorian kondisi keuangan disajikan dalam tabel 4.

**Tabel 4**  
**Hasil Pemeringkatan dan Pengkategorian Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten**

No	Kabupaten	Indeks Kondisi Keuangan	Kuartil	Kategori
1	Demak	0,13	1	Sangat Buruk
2	Grobogan	0,16	1	Sangat Buruk
3	Lombok Barat	0,16	1	Sangat Buruk
4	Sleman	0,17	1	Sangat Buruk
5	Klaten	0,19	1	Sangat Buruk
6	Bantul	0,22	1	Sangat Buruk
7	Lombok Tengah	0,25	2	Buruk
8	Banyumas	0,25	2	Buruk
9	Purbalingga	0,29	2	Buruk
10	Pekalongan	0,38	2	Buruk
11	Pamekasan	0,39	2	Buruk
12	Buleleng	0,39	3	Baik
13	Magelang	0,39	3	Baik
14	Jombang	0,40	3	Baik
15	Mojokerto	0,44	3	Baik
16	Bangli	0,45	3	Baik
17	Gianyar	0,45	3	Baik
18	Karangasem	0,54	4	Sangat Baik
19	Kulon Progo	0,56	4	Sangat Baik
20	Banjarnegara	0,60	4	Sangat Baik
21	Gunung Kidul	0,64	4	Sangat Baik
22	Badung	0,73	4	Sangat Baik
23	Brebes	0,82	4	Sangat Baik

## 2. Analisis Tingkat Layanan Pendidikan

### a. Analisis Capaian Indikator SPM

Analisis tingkat layanan pendidikan dilakukan dengan cara menghitung rata-rata capaian standar pelayanan minimal. Rumus dalam menghitung rata-rata capaian standar pelayanan minimal adalah persentase jumlah capaian seluruh indikator dibagi dengan jumlah indikator standar pelayanan minimal pendidikan. Data capaian SPM disajikan dalam lampiran 2. Adapun rumus untuk menghitung tingkat layanan adalah sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Layanan} = \frac{(\text{Indikator 1} + \text{Indikator 2} + \dots + \text{Indikator 27})}{27}$$

Ilustrasi penghitungan tingkat layanan pada Pemerintah Kabupaten Sleman ialah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Layanan} &= \frac{(100\% + 73\% + 85\% + \dots + 98\%)}{27} \\ &= 92.93\% \end{aligned}$$

### b. Pengkategorian Tingkat Layanan Pendidikan

Pemeringkatan tingkat layanan pendidikan dilakukan dengan cara mengurutkan capaian standar pelayanan minimal yang tertinggi ke yang terendah dan pengkategorian dilakukan dengan metode yang sama dengan pengkategorian kondisi keuangan pemerintah daerah, yaitu metode kuartil.

Hasil pengkategorian tingkat layanan disajikan dalam tabel 5 berikut.

**Tabel 5**  
**Hasil Pemeringkatan Pengkategorian Tingkat Layanan Pendidikan**

No	Kabupaten	Capaian SPM	Kuartil	Kategori	Rata-Rata
1	Lombok Tengah	34%	1	Sangat Buruk	53%
2	Lombok Barat	38%	1	Sangat Buruk	
3	Badung	55%	1	Sangat Buruk	
4	Buleleng	62%	1	Sangat Buruk	
5	Gianyar	63%	1	Sangat Buruk	
6	Bangli	66%	1	Sangat Buruk	
7	Purbalingga	69%	2	Buruk	73%
8	Pamekasan	71%	2	Buruk	
9	Grobogan	72%	2	Buruk	
10	Banyumas	74%	2	Buruk	
11	Karangasem	76%	2	Buruk	
12	Brebes	76%	3	Baik	81%
13	Pekalongan	77%	3	Baik	
14	Jombang	80%	3	Baik	
15	Banjarnegara	83%	3	Baik	
16	Gunung Kidul	85%	3	Baik	
17	Kulon Progo	87%	3	Baik	
18	Bantul	89%	4	Sangat Baik	94%
19	Mojokerto	91%	4	Sangat Baik	
20	Sleman	92%	4	Sangat Baik	
21	Klaten	92%	4	Sangat Baik	
22	Magelang	98%	4	Sangat Baik	
23	Demak	98%	4	Sangat Baik	

Sumber: Laporan SPM Pendidikan, *Roadmap* SPM Pendidikan Kabupaten.

### 3. Analisis Keterkaitan Kondisi Keuangan dengan Tingkat Layanan Pendidikan

Analisis keterkaitan kondisi keuangan dengan tingkat layanan pendidikan dilakukan dengan 2 metode analisis yaitu analisis konsistensi dan analisis nilai rata-rata. Hasil analisis konsistensi dan analisis rata-rata disajikan dalam uraian berikut.

#### a. Analisis Konsistensi

Berdasarkan hasil analisis konsistensi keterkaitan kondisi keuangan dengan tingkat layanan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat keterkaitan antara kondisi keuangan dengan tingkat layanan pendidikan. disimpulkan demikian karena hanya 5 pemerintah kabupaten yang berada di dalam kelompok kuartil yang sama, yaitu Kabupaten Lombok Barat pada kuartil 1, Purbalingga, Pamekasan dan Banyumas pada kuartil 2 dan Jombang pada kuartil 3.

Hasil analisis konsistensi keterkaitan kondisi keuangan dengan tingkat layanan pendidikan disajikan dalam tabel 6.

**Tabel 6**

**Analisis Konsistensi Keterkaitan Kondisi Keuangan dengan Tingkat Layanan Pendidikan**

No	Kabupaten	Kuartil Kondisi Keuangan	Kuartil SPM	Konsistensi	Keterkaitan
1	Lombok Tengah	2	1	Tidak	Tidak Terkait
2	Lombok Barat	1	1	Ya	Terkait
3	Badung	4	1	Tidak	Tidak Terkait
4	Buleleng	3	1	Tidak	Tidak Terkait
5	Gianyar	3	1	Tidak	Tidak Terkait
6	Bangli	3	1	Tidak	Tidak Terkait
7	Purbalingga	2	2	Ya	Terkait
8	Pamekasan	2	2	Ya	Terkait
9	Grobogan	1	2	Tidak	Tidak Terkait
10	Banyumas	2	2	Ya	Terkait
11	Karangasem	4	2	Tidak	Tidak Terkait
12	Brebes	4	3	Tidak	Tidak Terkait
13	Pekalongan	2	3	Tidak	Tidak Terkait
14	Jombang	3	3	Ya	Terkait
15	Banjarnegara	4	3	Tidak	Tidak Terkait
16	Gunung Kidul	4	3	Tidak	Tidak Terkait
17	Kulon Progo	4	3	Tidak	Tidak Terkait
18	Bantul	1	4	Tidak	Tidak Terkait
19	Mojokerto	3	4	Tidak	Tidak Terkait
20	Sleman	1	4	Tidak	Tidak Terkait
21	Klaten	1	4	Tidak	Tidak Terkait
22	Magelang	3	4	Tidak	Tidak Terkait
23	Demak	1	4	Tidak	Tidak Terkait

**b. Analisis Nilai Rata-Rata**

Berdasarkan hasil perbandingan rata-rata tingkat layanan dan kondisi keuangan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat keterkaitan antara kondisi keuangan dengan tingkat layanan pendidikan, karena pada kuartil 1 kondisi keuangan (sangat buruk) seharusnya tingkat layanan pendidikan juga sangat buruk, namun rata-rata capaian SPM termasuk dalam kategori buruk atau berada dalam kuartil 2. Untuk kuartil 2 kondisi keuangan (buruk) seharusnya tingkat layanan juga buruk namun rata-rata capaian SPM termasuk dalam kategori baik. Untuk kuartil 3 kondisi keuangan (baik) seharusnya tingkat layanan juga termasuk dalam kategori baik namun rata-rata capaian SPM menunjukkan kategori sangat baik. Untuk kuartil 4 kondisi keuangan (sangat baik) seharusnya tingkat layanan juga termasuk dalam kategori sangat baik hal ini sejalan dengan dengan rata-rata capaian SPM. Perbandingan rata-rata capaian SPM dengan kuartil kondisi keuangan disajikan dalam tabel 7.

**Tabel 7**  
**Nilai Rata-Rata Tingkat Layanan Pendidikan**

No	Kondisi Keuangan	Tingkat Layanan Pendidikan
1	Q1	53% (Q2)
2	Q2	73% (Q3)
3	Q3	81% (Q4)
4	Q4	94% (Q4)

#### **4. Analisis Penyebab Terdapat/Tidak Terdapat Keterkaitan Antara Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tingkat Layanan Pendidikan**

Untuk mengetahui mengapa tidak terdapat keterkaitan antara kondisi keuangan pemerintah dengan tingkat layanan pendidikan, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pemerintah kabupaten yang termasuk dalam klaster 2, yaitu Pemerintah Kabupaten Sleman. Beberapa tema yang dihasilkan dalam penelitian ini ialah keterlibatan dinas pendidikan dalam proses perencanaan dan penganggaran, pertimbangan pemerintah daerah dalam penetapan anggaran dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai standar pelayanan minimal.

##### **a. Faktor yang Memengaruhi Capaian SPM**

Ketika dilakukan konfirmasi apakah pemenuhan SPM dipengaruhi oleh dana yang tersedia partisipan menyebutkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam pemenuhan SPM bukan masalah anggaran atau dana, namun kemampuan SDM dari sekolah-sekolah. Sebagaimana diungkapkan oleh partisipan R.

“Sangat berhubungan mbak, namun ya karena anggaran untuk pendidikan itu besar jadi yang menjadi permasalahan bukan lagi di dananya tetapi lebih ke kapasitas SDMnya” (R-34).

Total anggaran untuk urusan pendidikan di Pemerintah Kabupaten Sleman sudah memenuhi minimal 20% dari total APBD. Jumlah total anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman adalah Rp741.589.567.429,00, sementara itu, jumlah yang dibutuhkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal hanya sebesar Rp20.141.591.340,00. Hal ini menunjukkan bahwa dinas pendidikan memiliki jumlah anggaran yang cukup besar dan sudah seharusnya layanan pendidikan diberikan dengan tingkat dan kualitas yang lebih baik.

##### **b. Keterlibatan Dinas Pendidikan dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran**

Berdasarkan kutipan wawancara berikut, keterlibatan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam proses perencanaan dan penganggaran sudah baik.

“...dinas pendidikan terlibat dalam proses penganggaran di pemda.” (R-4)

“Keterlibatannya kan masing-masing organisasi perangkat daerah, termasuk kami dinas pendidikan merencanakan kebutuhan, program, dan kegiatannya terlebih dahulu, misalnya dalam rangka program wajib belajar atau program lainnya yang wajib kita tentukan membutuhkan dana berapa, jadi pemerintah akan mensupport”. (R-6)

##### **c. Pertimbangan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Anggaran**

Berdasarkan kutipan wawancara berikut, SPM dijadikan dasar dalam penetapan anggaran. Standar pelayanan minimal adalah standar yang mengatur jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh warga negara secara minimal, artinya penetapan anggaran di pemerintah daerah harus terlebih memenuhi standar pelayanan minimal.

“Memang arahnya anggaran itu salah satunya disamping prioritas dan keterbatasan kita yang ada, itu tetap minimal memenuhi SPM dulu, kan begitu baru kalau sudah mencapai SPM nya silahkan.” (I-16)

#### **d. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah dalam Mencapai SPM**

Ketika dilakukan konfirmasi apakah pemenuhan SPM dipengaruhi oleh dana yang tersedia partisipan menyebutkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam pemenuhan SPM bukan masalah anggaran atau dana, namun kemampuan SDM dari sekolah-sekolah. Sebagaimana diungkapkan oleh partisipan R.

“Sangat berhubungan mbak, namun ya karena anggaran untuk pendidikan itu besar jadi yang menjadi permasalahan bukan lagi di dananya tetapi lebih ke kapasitas SDMnya” (R-34).

Berdasarkan hasil wawancara kepada partisipan, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan capaian SPM dari tahun ke tahun diantaranya ialah menyiapkan bantuan sarana dan prasarana berupa bantuan sosial, hibah, dana BOSDA, pelatihan guru, pelaksanaan bimbingan teknis tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah dan pendampingan penyusunan anggaran pendapatan berbasis sekolah.

#### **V. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterkaitan kondisi keuangan pemerintah daerah dengan tingkat layanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

1. Setelah dilakukan perbandingan kondisi keuangan pemerintah daerah dengan tingkat layanan pendidikan, berdasarkan pada perbandingan dan pengkategorian, maka tidak terdapat keterkaitan antara kondisi keuangan dengan tingkat layanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
2. Tidak terikatnya kondisi kondisi keuangan dengan tingkat layanan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Sleman disebabkan karena alokasi anggaran untuk pendidikan sudah memenuhi 20% dari total APBD yaitu senilai Rp741.589.567.429,00 jumlah ini merupakan jumlah yang cukup besar sedangkan kebutuhan anggaran untuk pemenuhan SPM hanya senilai Rp20.141.591.340,00. Kondisi keuangan bukan lagi menjadi permasalahan bagi Kabupaten Sleman, dalam kondisi keuangan yang buruk Pemerintah Kabupaten Sleman tetap dapat mencapai atau memberikan layanan yang baik kepada masyarakatnya.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memenuhi layanan kepada masyarakat adalah bantuan sarana dan prasarana berupa bantuan sosial, hibah, dana BOSDA, pelatihan guru, pelaksanaan bimbingan teknis tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah dan pendampingan penyusunan anggaran pendapatan berbasis sekolah.

#### **VI. Implikasi**

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia meskipun dalam kondisi keuangan yang buruk namun tetap dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. hal ini perlu dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya yang memiliki kondisi keuangan yang baik namun layanan yang diberikan kepada masyarakatnya masih tergolong buruk. Kondisi keuangan bukan menjadi alasan mengapa suatu pemerintah daerah lalai dalam memberikan layanan pendidikan yang baik. Karena jumlah alokasi anggaran untuk seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia minimal 20% dari total APBD, jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar dan sudah seharusnya mampu menutupi celah kebutuhan anggaran untuk pemenuhan capaian standar pelayanan minimal. Lebih lanjut, upaya-upaya yang dilakukan Kabupaten Sleman dalam mencapai layanan yang baik juga harus menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi NTB.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi NTB
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2017. Bali: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2017. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2017. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2017. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017. Semarang: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017. Sidoarjo: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2017. Semarang: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2017. Yogyakarta: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2017. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebe Tahun 2017. Semarang: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017. Semarang: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2017. Sidoarjo: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017. Yogyakarta: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2017. Yogyakarta: BPK RI Perwakilan Provinsi DIY.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017. Yogyakarta: BPK RI Perwakilan Provinsi DIY.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2017. Yogyakarta: BPK RI Perwakilan Provinsi DIY.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017. Sidoarjo: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017. Yogyakarta: BPK RI Perwakilan Provinsi DIY.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2017. Semarang: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2017. Semarang: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.



- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2017. Semarang: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- Carmeli, A. (2007). The Effect of Fiscal Condition of Local Government Authorities on Their Economic Development. *Economic Development Quarterly*, 21, 91-98.
- Carmeli, A. (2008). The Fiscal Distress of Local Government in Israel. *Administration and Society*, 39, 984-1007.
- Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Method Approaches*. Sage Publication.
- Dinapoli, T. P. (2011). *Financial Condition Analysis*. Albany, New York: Division of Local Government and School Accountability.
- Gomez, Z. (2009). Developing A Model To Measure Financial Condition In Local Government. *The American Review Of Public Administration*, 425-449.
- Gomez, Z. (2012). Effects Of The Crisis In Spanish Municipalities Financial Condition: An Empirical evidence (2005-2008). *International Journal Of Critical Accounting*.
- Hendrick, R. (2004) *Assessing and measuring the fiscal health of local government. Focus on Chicago suburban municipalities*, Urban Affairs Review.
- ICMA. (2011). *Fiscal Trend Monitoring System*. Paper Salina.
- Indonesia, R. (1945). *Undang-Undang Dasar*. Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2009). Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Indonesia, R. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Indonesia, R. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- Indonesia, R. (2014). *Undang Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah*. Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2018). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Jones, S. & Walker, G. (2007) *Explanators of local government distress*, Abacus.
- Kloha, P., Weissert, C. S., & Kleine, R. (2003). Developing and Testing a Composite Model to Predict Local Fiscal Distress. *Public Administration Review*.
- Maher. (2011). Measuring Municipal Fiscal Condition: Do Objective Measures Of Fiscal Health Relate To Subjective MEasure? *Journal Of Public Budgeting Accounting And Financial Management*.
- Matthew B Miles, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Monique Hennink, I. H. (2015). *Qualitative Research Methods*. London: Sage Publication.
- Ritonga, I. T. (2012). Assesing Financial Condition Of Local Government in Indonesia: an exploration. *Public and Municipal Finance*, 1(2).
- Ritonga, I. T. (2014). Developing A Measure Of Local Government's Financial Condition. *Journal Of Indonesian Economy And Business Vol 2*, 142-164.
- Ritonga, I. T. (2017). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rivenbark, W. C., Roenigk (2010) *Conceptualizing Financial Condition in Local Government*, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management.
- Sasongko, P. A. (2018). Pengklasteran Pemerintah Daerah Di Indonesia Untuk Optimalisasi Analisis Kondisi Keuangan. *Universitas Gadjah Mada*.

## Lampiran 1

### a. Indikator pencapaian dalam pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota

1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.
2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.
3. Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.
4. Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
5. Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.
6. Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.
7. Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.
9. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
10. Setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
11. Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
12. Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

### b. Indikator pencapaian dalam pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan

1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.
4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.
5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.
6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
  - a) Kelas I – II : 18 jam per minggu
  - b) Kelas III : 24 jam per minggu
  - c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu
  - d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu
7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku termasuk kurikulum 2013.
8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.
9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.
10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.
11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.
12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester.
13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

**Lampiran 2**  
**Data Analisis Kondisi Keuangan**

No	Kabupaten	Total Belanja Pendidikan	Peserta Didik	Jumlah Guru	Peserta Didik dan Guru	Rasio Belanja	Total Aset	Jumlah Peserta Didik dan Guru	Rasio Aset
1	Badung	Rp608.270.987.488,00	87749	5355	93104	Rp6.533.242,00	Rp1.297.382.915.679,00	93.104	Rp13.934.771,00
2	Bangli	Rp261.148.873.857,00	34163	2319	36482	Rp7.158.294,00	Rp236.706.814.193,00	36.482	Rp6.488.318,00
3	Gianyar	Rp559.053.022.334,00	69437	4154	73591	Rp7.596.758,00	Rp436.135.829.831,00	73.591	Rp5.926.483,00
4	Kulon Progo	Rp470.994.952.789,00	49549	4006	53555	Rp8.794.603,00	Rp359.743.233.749,00	53.555	Rp6.717.267,00
5	Karangasem	Rp562.520.000.000,00	64984	4393	69377	Rp8.108.163,00	Rp496.544.789.092,00	69.377	Rp7.157.196,00
6	Mojokerto	Rp676.018.084.107,00	100085	6455	106540	Rp6.345.204,00	Rp788.618.545.280,00	106.540	Rp7.402.089,00
7	Gunung Kidul	Rp674.090.000.000,00	74365	5316	79681	Rp8.459.859,00	Rp710.744.198.425,00	79.681	Rp8.919.870,00
8	Sleman	Rp741.589.567.429,00	127877	7856	135733	Rp5.463.591,00	Rp348.887.142.353,00	135.733	Rp2.570.393,00
9	Banjarnegara	Rp755.547.240.378,00	104709	6279	110988	Rp6.807.468,00	Rp1.170.979.683.385,00	110.988	Rp10.550.507,00
10	Lombok Barat	Rp414.340.458.073,00	83433	4873	88306	Rp4.692.099,00	Rp324.586.046.191,00	88.306	Rp3.675.696,00
11	Demak	Rp365.208.908.749,00	118658	6439	125097	Rp2.919.406,00	Rp686.509.495.824,00	125.097	Rp5.487.817,00
12	Buleleng	Rp678.233.793.411,00	101776	5828	107604	Rp6.303.054,00	Rp691.132.365.584,00	107.604	Rp6.422.924,00
13	Bantul	Rp661.448.086.950,00	106078	6435	112513	Rp5.878.859,00	Rp357.972.269.719,00	112.513	Rp3.181.608,00
14	Pekalongan	Rp656.809.251.892,00	102141	5519	107660	Rp6.100.773,00	Rp707.302.292.235,00	107.660	Rp6.569.778,00
15	Purbalingga	Rp665.380.000.000,00	112823	6098	118921	Rp5.595.143,00	Rp625.208.344.688,00	118.921	Rp5.257.342,00
16	Lombok Tengah	Rp648.866.186.671,00	114834	8143	122977	Rp5.276.321,00	Rp575.628.890.484,00	122.977	Rp4.680.785,00
17	Banyumas	Rp1.090.559.080.216,00	202859	10617	213476	Rp5.108.579,00	Rp1.054.709.396.566,00	213.476	Rp4.940.646,00
18	Jombang	Rp808.561.781.674,00	117335	7437	124772	Rp6.480.314,00	Rp793.107.439.743,00	124.772	Rp6.356.454,00
19	Klaten	Rp868.204.139.221,00	143931	9379	153310	Rp5.663.063,00	Rp434.423.787.162,00	153.310	Rp2.833.630,00
20	Magelang	Rp817.394.781.161,00	125980	7528	133508	Rp6.122.440,00	Rp895.587.887.320,00	133.508	Rp6.708.122,00
21	Brebes	Rp868.490.000.000,00	71311	10486	81797	Rp10.617.627,00	Rp795.998.124.293,00	81.797	Rp9.731.385,00
22	Pamekasan	Rp638.344.955.871,00	89684	7187	96871	Rp6.589.639,00	Rp576.474.252.321,00	96871	Rp5.950.948,00
23	Grobogan	Rp828.354.415.193,00	167093	8541	175634	Rp4.716.367,00	Rp626.738.877.145,00	175.634	Rp3.568.437,00

**Lampiran 3**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan**

No	Jenjang	Satuan	Badung	Bangli	Bantul	Buleleng	Demak	Gianyar	Gunung Kidul
			Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)
1	SD	Pemukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	SMP	Pemukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	SD	Sekolah	22%	22%	73%	18,90%	100%	20,75%	93%
	SMP	Sekolah	0%	0%	94%	0%	100%	0%	97%
3	SMP	Sekolah	0%	0%	35%	4,71%	99%	0%	31%
4	SD	Sekolah	53%	42%	70%	38,39%	96%	42,52%	76%
	SMP	Sekolah	28%	14%	93%	16,47%	95%	20%	65%
5	SD	Sekolah	73%	72%	100%	64,96%	93%	74,15%	100%
6	SMP	Sekolah	32%	36%	66%	14,12%	100%	17,39%	54%
7	SD	Sekolah	88%	94%	98%	91,54%	99%	91,50%	99%
8	SMP	Sekolah	65%	93%	93%	80,00%	100%	86,96%	95%
9	SMP	Sekolah	65%	39%	63%	43,53%	99%	45,65%	35%
10	SD	Sekolah	83%	87%	93%	83,46%	96%	85,37%	93%
11	SMP	Sekolah	62%	82%	78%	69,41%	100%	71,74%	83%
12		Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
13		Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	SD	Sekolah	60%	70%	96%	66,73%	100%	66,67%	89%
	SMP	Sekolah	33%	75%	100%	64,71%	100%	69,57%	91%
15	SD	Sekolah	38%	46%	78%	51%	99%	38%	46%
16	SMP	Sekolah	8%	4%	35%	8%	95%	11%	88%
17	SD	Sekolah	39%	58%	79%	73%	95%	60%	29%
18	SD	Sekolah	45%	61%	96%	68%	100%	48%	76%
	SMP	Sekolah	27%	54%	88%	75%	96%	43%	55%
19	SD	Sekolah	42%	64%	96%	62%	99%	16%	91%
	SMP	Sekolah	27%	57%	88%	72%	99%	9%	63%
20	SD	Sekolah	30%	37%	96%	46%	100%	93%	85%
	SMP	Sekolah	38%	61%	77%	67%	100%	89%	93%
21	SD	Sekolah	86%	92%	85%	91%	100%	94%	100%
	SMP	Sekolah	55%	89%	100%	81%	100%	93%	100%
22	SD	Sekolah	81%	84%	98%	79%	100%	88%	96%
	SMP	Sekolah	52%	93%	97%	81%	100%	59%	100%
23	SD	Sekolah	79%	77%	99%	78%	99%	85%	100%
	SMP	Sekolah	48%	93%	99%	79%	98%	52%	100%
24	SD	Sekolah	68%	79%	99%	74%	95%	84%	96%
	SMP	Sekolah	7%	25%	97%	4%	90%	28%	87%
25	SD	Sekolah	76%	75%	99%	78%	100%	85%	100%
	SMP	Sekolah	47%	89%	99%	80%	100%	52%	100%
26	SD	Sekolah	87%	92%	99%	91%	100%	94%	99%
	SMP	Sekolah	57%	96%	100%	81%	98%	91%	91%
27	SD	Sekolah	85%	89%	100%	91%	100%	92%	100%
	SMP	Sekolah	58%	86%	99%	81%	100%	89%	100%
Rata-Rata Capaian SPM			55%	66%	89%	62%	98%	63%	85%

No	Jenjang	Satuan	Karangasem	Klaten	Kulon Progo	Lombok Barat	Lombok Tengah	Magelang	Mojokerto
			Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
1	SD	Pemukiman	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
	SMP	Pemukiman	100%	94%	100%	100%	100%	100%	100%
2	SD	Sekolah	31,13%	90%	98%	13%	18%	100%	96%
	SMP	Sekolah	0%	95%	97%	0%	0%	100%	77%
3	SMP	Sekolah	6,00%	81%	56%	0%	0%	100%	50%
4	SD	Sekolah	27,00%	72%	69%	24%	15%	100%	100%
	SMP	Sekolah	12,00%	97%	87%	6%	6%	100%	100%
5	SD	Sekolah	95,32%	92%	100%	46%	33%	80%	100%
6	SMP	Sekolah	10,00%	93%	38%	6%	8%	100%	100%
7	SD	Sekolah	98,90%	96%	99%	75%	62%	100%	100%
8	SMP	Sekolah	80,00%	83%	100%	30%	21%	100%	100%
9	SMP	Sekolah	54,00%	83%	44%	13%	8%	100%	65%
10	SD	Sekolah	93,39%	97%	87%	68%	58%	100%	90%
11	SMP	Sekolah	70,00%	95%	78%	29%	19%	100%	91%
12		Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13%
13		Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	SD	Sekolah	99%	75%	82%	38%	43%	75%	100%
	SMP	Sekolah	94,00%	89%	96%	15%	15%	75%	100%
15	SD	Sekolah	58%	76%	72%	12%	7%	100%	75%
16	SMP	Sekolah	60%	89%	19%	3%	3%	100%	70%
17	SD	Sekolah	92%	70%	71%	29%	33%	100%	59%
18	SD	Sekolah	94%	87%	94%	33%	27%	100%	90%
	SMP	Sekolah	66%	90%	75%	14%	12%	100%	85%
19	SD	Sekolah	90%	85%	91%	41%	38%	100%	100%
	SMP	Sekolah	54%	84%	84%	12%	11%	100%	100%
20	SD	Sekolah	98%	97%	100%	22%	32%	90%	100%
	SMP	Sekolah	90%	98%	84%	27%	13%	100%	100%
21	SD	Sekolah	100%	100%	100%	59%	58%	100%	100%
	SMP	Sekolah	100%	100%	100%	33%	26%	100%	100%
22	SD	Sekolah	92%	98%	96%	57%	52%	100%	99%
	SMP	Sekolah	92%	100%	91%	32%	23%	100%	91%
23	SD	Sekolah	92%	96%	98%	57%	52%	100%	99%
	SMP	Sekolah	86%	100%	92%	29%	21%	100%	95%
24	SD	Sekolah	98%	96%	98%	53%	47%	100%	100%
	SMP	Sekolah	0%	97%	85%	12%	7%	100%	100%
25	SD	Sekolah	90%	100%	98%	55%	52%	100%	100%
	SMP	Sekolah	86%	100%	95%	30%	22%	100%	100%
26	SD	Sekolah	100%	100%	99%	59%	59%	100%	100%
	SMP	Sekolah	98%	100%	95%	34%	25%	100%	100%
27	SD	Sekolah	100%	100%	97%	58%	59%	100%	100%
	SMP	Sekolah	100%	97%	97%	33%	25%	100%	100%
Rata-Rata Capaian SPM			76%	92%	87%	38%	34%	98%	91%

No	Jenjang	Satuan	Sleman	Jombang	Banyumas	Brebes	Banjarnegara	Pekalongan
			Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)
1	SD	Pemukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	SMP	Pemukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	SD	Sekolah	73%	69%	63%	47%	83%	65%
	SMP	Sekolah	85%	100%	78%	55%	91%	60%
3	SMP	Sekolah	80%	37%	32%	19%	20%	27%
4	SD	Sekolah	86%	55%	59%	78%	61%	78%
	SMP	Sekolah	84%	27%	46%	50%	58%	72%
5	SD	Sekolah	99%	100%	99%	93%	100%	87%
6	SMP	Sekolah	91%	23%	39%	37%	44%	18%
7	SD	Sekolah	100%	98%	97%	100%	100%	99%
8	SMP	Sekolah	100%	57%	79%	96%	93%	90%
9	SMP	Sekolah	85%	74%	36%	33%	37%	42%
10	SD	Sekolah	90%	83%	81%	95%	95%	89%
11	SMP	Sekolah	88%	85%	68%	83%	75%	75%
12		Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13		Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	SD	Sekolah	86%	76%	67%	71%	60%	73%
	SMP	Sekolah	97%	77%	42%	55%	63%	52%
15	SD	Sekolah	95%	100%	72%	73%	57%	74%
16	SMP	Sekolah	79%	53%	25%	46%	48%	11%
17	SD	Sekolah	78%	22%	49%	15%	6%	16%
18	SD	Sekolah	91%	35%	65%	39%	100%	57%
	SMP	Sekolah	0%	35%	35%	29%	70%	42%
19	SD	Sekolah	100%	84%	50%	69%	70%	58%
	SMP	Sekolah	91%	26%	52%	26%	69%	33%
20	SD	Sekolah	100%	100%	76%	82%	99%	100%
	SMP	Sekolah	100%	100%	79%	91%	95%	100%
21	SD	Sekolah	100%	100%	99%	100%	100%	100%
	SMP	Sekolah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	SD	Sekolah	100%	100%	94%	92%	100%	95%
	SMP	Sekolah	100%	100%	76%	84%	100%	89%
23	SD	Sekolah	100%	100%	96%	93%	100%	96%
	SMP	Sekolah	100%	100%	80%	89%	100%	91%
24	SD	Sekolah	95%	100%	93%	90%	99%	92%
	SMP	Sekolah	100%	100%	60%	82%	100%	83%
25	SD	Sekolah	100%	67%	96%	100%	100%	97%
	SMP	Sekolah	100%	100%	78%	100%	100%	89%
26	SD	Sekolah	100%	100%	95%	100%	100%	96%
	SMP	Sekolah	100%	100%	98%	100%	100%	92%
27	SD	Sekolah	98%	100%	96%	100%	100%	100%
	SMP	Sekolah	98%	100%	90%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian SPM			92%	80%	74%	76%	83%	77%

No	Jenjang	Satuan	Purbalingga	Pamekasan	Grobogan
			Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)
1	SD	Pemukiman	100%	100%	100%
	SMP	Pemukiman	100%	100%	100%
2	SD	Sekolah	67%	84%	47%
	SMP	Sekolah	69%	92%	60%
3	SMP	Sekolah	30%	9%	19%
4	SD	Sekolah	54%	38%	59%
	SMP	Sekolah	47%	74%	83%
5	SD	Sekolah	99%	99%	100%
6	SMP	Sekolah	32%	47%	64%
7	SD	Sekolah	100%	98%	100%
8	SMP	Sekolah	100%	95%	69%
9	SMP	Sekolah	43%	18%	34%
10	SD	Sekolah	87%	85%	96%
11	SMP	Sekolah	55%	65%	70%
12		Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
13		Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
14	SD	Sekolah	60%	50%	55%
	SMP	Sekolah	18%	38%	45%
15	SD	Sekolah	80%	78%	49%
16	SMP	Sekolah	25%	39%	18%
17	SD	Sekolah	7%	15%	8%
18	SD	Sekolah	48%	39%	29%
	SMP	Sekolah	45%	30%	6%
19	SD	Sekolah	65%	32%	79%
	SMP	Sekolah	5%	14%	71%
20	SD	Sekolah	81%	91%	90%
	SMP	Sekolah	77%	91%	85%
21	SD	Sekolah	93%	100%	96%
	SMP	Sekolah	95%	100%	94%
22	SD	Sekolah	96%	75%	96%
	SMP	Sekolah	51%	76%	79%
23	SD	Sekolah	95%	81%	98%
	SMP	Sekolah	52%	83%	94%
24	SD	Sekolah	96%	77%	77%
	SMP	Sekolah	63%	71%	35%
25	SD	Sekolah	96%	82%	93%
	SMP	Sekolah	46%	81%	87%
26	SD	Sekolah	91%	95%	100%
	SMP	Sekolah	80%	95%	87%
27	SD	Sekolah	94%	97%	98%
	SMP	Sekolah	94%	97%	89%
Rata-Rata Capaian SPM			69%	71%	72%